

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 5, Juni 2023, Halaman 340-346
e-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.8019182)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019182>

Penerapan PERPU Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022 Terhadap Jam Operasional Angkutan Umum di Jakarta Selatan

**Bayu Suryadi Manggala¹, Rayhan Syahbana Mahendra², Terra Whisnu Murti³,
Sri Stevani Arumi⁴, Hikmal Yusuf Argiansyah⁵, Mulyadi⁶**

¹²³⁴⁵⁶Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,

Jalan RS. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan, 12450.

Email: 2110611029@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2110611175@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2110611085@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2110611014@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2110611094@mahasiswa.upnvj.ac.id, mulyadiupn169@gmail.com

Abstrak

Angkutan umum merupakan hal yang vital dalam mobilitas masyarakat dalam suatu wilayah perkotaan, tetapi hingga saat ini masih terdapat berbagai masalah yang menghambat produktivitas dan efisiensi angkutan umum di daerah tersebut. Dengan disahkannya PERPU Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022 diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam operasional angkutan umum. Namun, implementasi PERPU Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022 ini tidaklah mudah. Dibutuhkan kerja sama antara Pemerintah, Operator Angkutan Umum, dan masyarakat untuk menerapkan aturan tersebut dengan baik. Tulisan ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas implementasi PERPU Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022 dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam operasional angkutan umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik studi kasus normatif dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan masalah produktivitas dan efisiensi angkutan umum di DKI Jakarta adalah dikarenakan ketidakseimbangan antara jumlah angkutan umum yang disediakan dengan jumlah masyarakat yang melakukan mobilitas di DKI Jakarta. Solusi dari hal tersebut adalah dengan meningkatkan infrastruktur serta layanan yang handal dan nyaman di dalam suatu moda transportasi umum, carpooling, dan memberikan fleksibilitas waktu dan tempat kerja, seperti bekerja dari rumah (WFH) atau shift masuk dan pulang kerja yang berbeda-beda.

Kata Kunci : Angkutan Umum, Produktivitas, efisiensi, implementasi.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya waktu terus berjalan dan tidak akan pernah berhenti¹, waktu merupakan satuan angka yang menunjukkan pagi siang sore dan malam setiap harinya. Waktu tidak akan pernah mundur akan tetapi waktu terus maju. Pada umumnya masyarakat menggunakan waktu setiap harinya dengan mengisi kegiatan dan tanggung jawab masing masing. Waktu dimulai dari dini hari yaitu pada pukul 01.00-05.00 selanjutnya pada pukul 05.00-10.59 yang di jam tersebut menunjukkan pagi hari setelah itu pada jam 11.00-15.00 menunjukkan waktu siang hari pada di jam 15.00-18.00 merupakan waktu sore hari, pada waktu malam hari di tunjukan pada jam 19.00-00.00. Pada jam 07.00 rata rata keseluruhan masyarakat menjadikan jam itu sebagian jam kerja yang dimana semuanya menuju kepada tempat kerja, sekolah dan kegiatan yang dituju masyarakat. Angkutan umum merupakan suatu transportasi yang digunakan oleh masyarakat untuk mempermudah jalannya perjalanan yang mempunyai muatan berbeda beda dengan maksud dan tujuan berbeda pada tiap-tiap pengguna

¹ Elvina, S. N. (2019). Teknik self management dalam pengelolaan strategi waktu kehidupan pribadi yang efektif. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 3(2), 123-138

transportasi². Angkutan umum terbagi menjadi dua yaitu paratransit dan mass transit³. Kemacetan pada jam kerja merupakan hal yang lumrah sulit sekali masyarakat hindari. kemacetan pada saat jam 06.30-10.00 penyebab kemacetan itu sendiri adalah banyaknya aktivitas pada jam tersebut. Sehingga, menimbulkan padatnya jalanan oleh kendaraan. Berbagai cara pemerintah melakukan dengan penanggulangan pada pengurangan kemacetan pada jam operasional jam kerja yang dimana cara oleh pemerintah dilakukan diantaranya membangun MRT, Membuat trans jakarta, Membangun komputer line, Membuat fly over, Serta rancangan jalan berbayar atau ERP (Electronic Road Pricing)

Pada jasa jasa angkutan umum yang sekarang terbagi dua yang ada angkutan umum biasa untuk menaik dan turunkan penumpang serta ada yang menggunakan angkutan umum seperti biasa tapi menggunakan kartu atau lebih singkatnya jaklingko, Angkutan umum jaklingko mempunyai peranan besar pada para pengguna kartu jaklingko. Selain, biaya transportasi yang murah menjadi faktor pendukung masyarakat menggunakan angkutan umum tersebut juga terjadi pengurangan pengendara di jalanan. Akan tetapi, hal ini tentu saja merugikan pada jasa angkutan umum yang memakai sistem cash sehingga pengurangan penumpang terjadi pada angkutan umum biasa.

Pada masa pandemi COVID-19 angka penurunan kemacetan menurun Perubahan signifikan terjadi pada 2020, di mana persentase kemacetan Jakarta turun 36%. Kemudian dilanjut pada tahun 2021 persentasenya pengurangan terjadi lagi sehingga menjadi 34%. Artinya, jika dibandingkan dengan perjalanan dalam kondisi lengang, rata-rata durasi perjalanan di Jakarta saat ini 34% lebih lama akibat terhambat macet. Saat ini Jakarta pun tercatat berada di peringkat ke-46 dunia menurut TomTom Traffic Index⁴. tahun 2020-2022 memang masih berlaku pada PPKM akan tetapi keberlakuan tersebut menjadikan para pekerja bekerja di rumah atau bisa disebut WFH (work from home) yang dimana semuanya bekerja sesuai aturan dirumah dan tidak menjadikan kantor sebagai tempat bekerja. Akan tetapi, setelah PPKM sudah tidak lagi digunakan maka masyarakat mulai kembali lagi bekerja pada tempat pekerjaan dan memulai aktivitas seperti sebelum pandemi COVID-19. Tepat pada 30 Desember tahun 2022 PPKM resmi dicabut oleh Presiden Joko Widodo sehingga aktivitas sekarang rata rata bekerja dikantor atau anak sekolah sudah banyak yang belajar di sekolah seperti kegiatan sebelum pandem Pada i berlangsung.

Seiring dengan pertumbuhan populasi dan perkembangan ekonomi di Jakarta Selatan, permintaan akan angkutan umum semakin meningkat. Namun, terdapat berbagai masalah yang menghambat produktivitas dan efisiensi angkutan umum di daerah tersebut, seperti kemacetan lalu lintas, tidak teraturnya jadwal keberangkatan, dan kurangnya penggunaan teknologi yang memadai. Dalam rangka meningkatkan produktivitas dan efisiensi angkutan umum di Jakarta Selatan, PERPU Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022 memberikan beberapa aturan, antara lain adalah pembatasan jam operasional angkutan umum. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan waktu dan mengurangi biaya operasional yang tidak efisien. Dengan adanya aturan ini, diharapkan angkutan umum dapat beroperasi dengan lebih efisien dan mengurangi kemacetan lalu lintas. Selain itu, aturan ini juga dapat mendorong penggunaan teknologi yang lebih canggih untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam operasional angkutan umum.

² Mutiawati, C. (2019). Kinerja Pelayanan Angkutan Umum Jalan Raya. Deepublish.

³ Puspitasari, E., Meydiyana, A. A., & Maryunani, W. P. (2022). Analisis Karakteristik Perilaku Perjalanan Angkutan Umum Jenis Paratransit di Kota Magelang. *Reviews in Civil Engineering*, 6(2), 61-66.

⁴ Vika Azkiya Dhini, *Indeks Tom Tom Kemacetan Jakarta Terus Berkurang Dalam 5 Tahun Sekali*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/02/indeks-tomtom-kemacetan-jakarta-terus-berkurang-dalam-5-tahun-terakhir>, Diakses pada 27 Maret 2023

Namun, implementasi PERPU Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022 tidaklah mudah. Dibutuhkan kerja sama antara Pemerintah, Operator Angkutan Umum, dan masyarakat untuk menerapkan aturan tersebut dengan baik. Selain itu, perlu juga dilakukan evaluasi dan perbaikan terus-menerus untuk memastikan efektivitas dari penerapan aturan ini dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi angkutan umum di Jakarta Selatan.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan Metode penelitian penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder untuk memahami adanya hubungan antara ilmu hukum dengan hukum positif. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan konseptual merujuk pada prinsip-prinsip yang ada dalam pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Sedangkan pendekatan perundang-undangan merujuk pada peraturan perundang-undangan berupa legislasi dan regulasi terkait Jadwal Angkutan Umum serta asas-asas yang berlaku pada perundang-undangan tersebut. Pendekatan dilakukan dengan menganalisis konsep Jam Angkutan Umum dalam perspektif PERPU Cipta Kerja. Alat pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam jurnal ini berupa studi kepustakaan atau penelusuran literatur dengan menggunakan data sekunder. Studi kepustakaan dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang digunakan melalui data tertulis yang kemudian dilakukan analisis terhadap isi data tersebut.

HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

Implementasi dari PERPPU Cipta kerja terkait jam operasional angkutan umum.

Jam Kerja para pekerja di Indonesia telah dituangkan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diatur dalam pasal 77 kemudian Undang-Undang tersebut diperbarui kembali menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang tersebut memuat skema jam kerja yang berlaku di perusahaan maupun perkantoran di Indonesia yakni

- a. 7 Jam Kerja dalam sehari atau 40 Jam dalam seminggu yang berlaku untuk 6 hari kerja dengan ketentuan libur 1 hari
- b. 8 Jam Kerja dalam sehari atau 40 jam dalam seminggu yang berlaku untuk 5 hari kerja dengan ketentuan libur 2 hari

Ketentuan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di dalam perusahaan termasuk hari libur bagi para pekerja dimana perusahaan dapat memberikan libur di akhir pekan ataupun hari-hari lainnya. Tetapi Peraturan mengenai ketentuan jam kerja ini tidak berlaku bagi perusahaan yang bergerak dibidang tertentu yang dimana telah tertuang dalam Pasal 21 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 atau Pasal 77 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Perusahaan yang dimaksud tertuang dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-233/MEN/2003 Tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan yang Dijalankan Secara Terus Menerus dalam Pasal 3 Ayat (1) yakni:

- a. Pekerjaan yang bergerak di pelayanan jasa kesehatan:
- b. Pekerjaan yang bergerak di pelayanan jasa transportasi
- c. Pekerjaan yang bergerak di pelayanan perbaikan alat transportasinya
- d. pekerjaan yang bergerak di bidang usaha pariwisata
- e. pekerjaan di bidang jasa pos dan telekomunikasi
- f. pekerjaan yang bergerak di bidang penyediaan tenaga listrik, pelayanan air bersih, penyediaan bahan bakar minyak dan gas bumi
- g. pekerjaan di bidang usaha swalayan, perbelanjaan, dan sejenisnya

- h. pekerjaan yang bergerak di bidang media massa
- i. pekerjaan yang bergerak di bidang pengamanan
- j. lembaga konservasi
- k. pekerjaan-pekerjaan yang jika dihentikan akan mengganggu proses produksi, merusak bahan, dan juga pemeliharaan/perbaikan alat produksi.

Perusahaan atau Perkantoran yang tidak memiliki kriteria tersebut diatas, harus menyesuaikan jam kerja yang telah diatur dalam Perpu Cipta Kerja. Pada Faktanya, Para Pekerja sering mendapatkan keluhan datang terlambat dikarenakan jam operasional angkutan umum yang tidak sesuai dengan waktu jam kerja di kantor. Perusahaan pada umumnya menetapkan jam kerja dimulai pada jam 07.00 WIB hingga 09.00 WIB dimana waktu yang normal untuk waktu bekerja. Sayangnya fasilitas angkutan umum di Indonesia tidak menunjang para pekerja untuk datang tepat waktu menuju tempat kerjanya dikarenakan para pekerja harus mempersiapkan sebelum jam tersebut, pekerja harus sudah di kantor atau perusahaan.

Pemerintah DKI Jakarta sudah menyiapkan berbagai jenis angkutan umum untuk mobilitas para warga dan para pekerja yang bekerja di Jakarta. Angkutan umum yang sudah disediakan antara lain terdapat rail-based transit yang meliputi KRL (Commuter Line), MRT dan LRT, dan angkutan jalanan seperti Transjakarta dan Jaklingko. KRL memiliki jumlah stasiun sebanyak 93 stasiun dan memiliki 1.205 unit kereta. LRT memiliki 18 stasiun yang menggapai hingga daerah-daerah sub-urban di sekitar wilayah jakarta seperti Bodetabek. MRT memiliki 13 stasiun dan 96 unit kereta. Setiap moda transportasi memiliki jam operasional yang berbeda, seperti KRL yang memiliki jam operasional mulai pukul 03.00 - 23.49 WIB, LRT yang memiliki jam operasional mulai pukul 05.30 - 22.30 WIB dan MRT yang memiliki jam operasional mulai pukul 05.00 - 24.00 WIB. Apabila, kita jumlahkan jumlah stasiun dan unit kereta dari angkutan umum rail-based transit di Jakarta, tentu saja angka tersebut sangatlah besar ditambah lagi terdapat angkutan jalan seperti Transjakarta yang memiliki jumlah halte sebanyak 260 Halte yang memiliki bus sebanyak 1347 unit dengan jam operasional selama 24 Jam. Sedangkan, Jaklingko sendiri memiliki banyak tempat pemberhentian untuk menggapai daerah-daerah pemukiman para warga, jumlah unit dari Jaklingko sendiri sebanyak 3.359 unit yang terdiri dari bus besar, bus sedang, dan bus kecil dengan jam operasional mulai pukul 05.00 - 21.00 WIB.

Apabila dilihat dari angkanya saja, tentu jumlah angkutan umum yang disediakan oleh pemerintah DKI Jakarta sudah tergolong sangat banyak dan jam operasional dari angkutan umum di DKI Jakarta sudah memadai untuk para warga di DKI Jakarta yang sebagian besar masuk pada pukul 07.00 - 09.00 WIB dan pulang pada 03.00 - 05.00 WIB. Namun, dengan jumlah sebanyak itu jam operasional yang memadai pun masih tidak sebanding dengan jumlah mobilitas para warga DKI Jakarta dan para pekerja yang bekerja di DKI Jakarta. Jumlah warga DKI Jakarta sudah sebanyak 11.063.324 orang menurut Badan Pusat Statistik DKI Jakarta pada tahun 2019 dan jumlah tersebut bertambah pesat pada saat jam sibuk (rush hour) yang dikarenakan penduduk dari luar jakarta atau kota-kota sub-urban Jakarta seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang bekerja di Jakarta atau pekerja yang harus melalui DKI Jakarta untuk mencapai ke tempat kerja mereka. Ketidaksebandingan tersebut juga ditunjukkan dalam tingkat jumlah penumpang dari angkutan umum di Jakarta yang sudah dapat mencapai angka 92,35% pada hari kerja.⁵ Hal tersebut mempengaruhi dari tingkat kepuasan masyarakat terdapat moda transportasi umum di DKI Jakarta yang berada pada

⁵ Wijianto, Bambang Istianto, dan Rukman. 2022. Analisis Kepuasan Publik Terhadap Angkutan Umum Model Jak Linko sebagai Pengintegrasian Antar Moda Transportasi Publik di DKI Jakarta. *Jurnal Keselamatan Transportasi Jalan*. 9(2). 123.

angka 74,14% untuk KRL (Commuter Line), 85.10% untuk MRT, 74% untuk Transjakarta, dan 79.40% untuk Jaklingko.⁶

Faktor dari ketidakseimbangan antara jumlah angkutan umum dan jumlah mobilitas para warga DKI Jakarta dan para pekerja yang bekerja di DKI Jakarta dan kurangnya tingkat kepuasan dari angkutan umum yang tersedia tersebut yang masih menyebabkan banyak masyarakat yang memilih menggunakan kendaraan pribadi roda dua, maupun roda empat yang menjadi salah satu penyebab besar dari kemacetan yang ada di jalanan DKI Jakarta. Perkembangan suatu kota termasuk DKI Jakarta yang memiliki potensi sebagai kota yang berhubungan erat dengan pertumbuhan jumlah penduduk secara alami yang diliputi oleh faktor lowongan kerja yang melimpah. dengan perkembangan penduduk yang bermigrasi dan menetap di perkotaan, maka akan mengakibatkan bertambahnya kebutuhan dari berbagai aspek seperti sarana dan prasarana untuk pelayanan kehidupan di kota dan bertambah luasnya perkampungan di perkotaan yang disertai dengan perkembangan pemukiman-pemukiman kumuh maupun baru di pinggir kota.

Jika tidak ditanggulangi secara baik, perkembangan ini akan terus menerus meningkat sampai waktu tertentu, dan jika ada beberapa fasilitas maupun kebutuhan perkotaan tidak memadai untuk para imigran maupun pekerja-pekerja yang menetap di kota tersebut, akan ada timbulnya tendensi terbentuknya kota-kota baru yang memiliki kaitan erat dengan kota-kota inti. Adapun beberapa masalah transportasi maupun angkutan umum di Jakarta Selatan yang dimana disebabkan oleh beberapa faktor yakni:

- a. Adanya kekeliruan dalam pengelolaan lalu lintas jalan;
- b. Kekurangan dalam mengimplementasikan kebijaksanaan transportasi
- c. Kebijaksanaan transportasi yang tidak tepat dengan kebutuhan masyarakat;
- d. Prasarana dan sarana transportasi maupun angkutan umum yang tidak memadai.

Masalah transportasi merupakan masalah yang sering dialami oleh pusat-pusat perkotaan seperti DKI Jakarta yang telah dipadati oleh penduduk-penduduk sehingga laju pertumbuhan penduduk nya meningkat dengan pesat yang mengakibatkan kepadatan ruang yang sangat tinggi maupun pola tata guna lahan yang tidak teratur lagi sesuai dengan peruntukannya. dengan demikian wilayah Jakarta Selatan yang awalnya menurut RUTR Kota yang direncanakan sebagai kota resapan air telah menyimpang dengan fungsi utamanya. Dikarenakan hal tersebut, produktivitas para pekerja menjadi tidak efisien dan tidak teratur dikarenakan banyaknya faktor-faktor yang menghambat pekerja untuk datang tepat waktu menuju kantor.

Penanggulangan terhadap Kemacetan pada Jam Operasional/Jam Kerja

Pada saat pandemi sesuai dengan kebijakannya kala itu pekerja kantoran dan para pelajar menggunakan sistem WFH (Work From Home) dan PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh) yang awalnya menghindari dengan kontak fisik untuk menghilangkan angka COVID-19 menimbulkan dampak positif pada jalanan yang dimana jalanan awalnya angka kemacetan nya sangat padat menjadi longgar dan tidak ramai pengguna jalan, akan tetapi sistem ini masih banyak kurangnya para pedagang kaki lima yang terkena imbas dari sistem ini dan menjadi kehilangan mata pencaharian para pedagang.

PERPU No. 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Pasal 77 Ayat (4) berbunyi:

“(4) Pelaksanaan jam kerja bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama”.⁷

⁶ Zahra, Noveesra, Imam Baihaqi, dan Dewie Saktia Ardiantono. 2020. Evaluasi Kualitas Pelayanan pada Industri Angkutan Umum: Studi Kasus Mikrotrans Jak Lingko. *Jurnal Sains dan Seni ITS*. . 9(1). 58-62.

⁷ Pemerintah Indonesia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. LN Sekretariat Negara No. 238. Jakarta.

Pada perusahaan tentunya mempunyai perjanjian kerja antara pekerja dan pihak perusahaan yang dimana menganut isi sistem peraturan yang berlaku pada aturan perusahaan, Jam operasional pada isi perjanjian tersebut dijelaskan dari jam awal masuk dan jam pulang kerja sehingga banyaknya jam kerja pada jam 07.00 sampai jam 16.00 pulang kerja yang membuat jam sekitar tersebut menimbulkan kemacetan pada jalanan.

Kemacetan pada jam operasional atau jam kerja telah menjadi masalah yang umum di banyak kota besar di seluruh dunia. Hal ini bukan hanya mengganggu produktivitas dan kesejahteraan individu, tetapi juga memiliki dampak buruk pada lingkungan, kesehatan, dan ekonomi. Oleh karena itu, tindakan yang cepat dan tepat perlu dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Salah satu cara untuk mengatasi kemacetan pada jam kerja adalah dengan mendorong penggunaan transportasi massal seperti kereta api, bus, atau trem. Dengan menggunakan transportasi massal, jumlah kendaraan pribadi yang berada di jalan raya dapat berkurang, sehingga dapat mengurangi kemacetan lalu lintas. Namun, penggunaan transportasi massal harus disertai dengan infrastruktur yang memadai seperti jaringan jalur yang luas, stasiun atau halte yang mudah diakses, serta layanan yang handal dan nyaman.

Selain transportasi massal, penerapan carpooling juga dapat menjadi alternatif untuk mengurangi kemacetan lalu lintas pada jam sibuk. Carpooling merupakan suatu sistem pengangkutan di mana beberapa orang berkendara bersama-sama menggunakan kendaraan yang sama. Dengan cara ini, jumlah kendaraan yang berada di jalan raya dapat berkurang dan membuat lalu lintas menjadi lebih lancar. Selain itu, carpooling juga dapat mengurangi biaya transportasi individu dan dapat memperbaiki kualitas udara yang lebih baik. Tidak hanya transportasi massal dan carpooling, pengaturan waktu kerja dapat menjadi alternatif lainnya dalam mengatasi kemacetan lalu lintas. Dengan memberikan fleksibilitas waktu kerja, seperti bekerja dari rumah atau shift kerja yang berbeda-beda, karyawan dapat menghindari jam sibuk di jalan raya dan mengurangi kepadatan kendaraan pada jam-jam tersebut.

Namun, infrastruktur yang memadai, transportasi massal dan carpooling, serta pengaturan waktu kerja yang fleksibel saja tidak cukup untuk mengatasi masalah kemacetan lalu lintas pada jam kerja. Selain itu, pemerintah dan masyarakat juga harus bekerja sama untuk melakukan edukasi terkait pentingnya mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, dan memilih transportasi yang lebih ramah lingkungan dan efisien. Solusi untuk mengatasi kemacetan lalu lintas pada jam kerja tidak dapat dicapai hanya dengan satu cara saja. Penggunaan transportasi massal, carpooling, pengaturan waktu kerja yang fleksibel, dan edukasi harus dilakukan secara bersamaan dan terintegrasi. Hanya dengan cara ini, kemacetan pada jam kerja dapat diatasi dan kualitas hidup di perkotaan dapat ditingkatkan.

KESIMPULAN

Angkutan umum merupakan hal yang vital dalam mobilitas masyarakat dalam suatu wilayah perkotaan, tetapi hingga saat ini masih terdapat berbagai masalah yang menghambat produktivitas dan efisiensi angkutan umum di daerah tersebut. Dengan disahkannya PERPU Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022 diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam operasional angkutan umum. Namun, implementasi PERPU Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022 ini tidaklah mudah. Dibutuhkan kerja sama antara Pemerintah, Operator Angkutan Umum, dan masyarakat untuk menerapkan aturan tersebut dengan baik. Angkutan umum menjadi sarana dan prasarana para pekerja untuk melakukan aktivitas dan menunjang produktivitas para pekerja secara efisien. Jika Angkutan umum tidak dijaga dan dikelola dengan baik, maka akan berdampak pada produktivitas para pekerja untuk menjalankan tugasnya sebagai penggerak ekonomi negara. Kemacetan pada jam kerja merupakan hal yang sangat biasa terjadi di Ibu Kota Jakarta yang dimana sebagai pusat imigran untuk mendapatkan pekerjaan dan menjadi kota yang sangat produktif seperti kota-kota pusat di negara lainnya seperti Jepang di Tokyo, Malaysia di Kuala Lumpur dan lainnya.

Kemacetan tersebut disebabkan karena ketimpangan antara sarana dan prasarana yang digunakan oleh masyarakat di daerah tersebut dengan kenaikan jumlah penduduk yang tidak teratur dan selalu meningkat setiap tahunnya. Oleh karena ketimpangan tersebut, masyarakat yang awalnya bekerja secara produktif dan kerja sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan menjadi terbengkalai karena ketimpangan tersebut. Hal ini yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah untuk meningkatkan dan memperbaiki fasilitas-fasilitas angkutan umum dengan kebijakan yang membantu mobilitas masyarakat untuk bekerja. Jika fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada para pekerja memadai, produktivitas dari para pekerja untuk membangun perekonomian negara tidak akan terhambat. Maka dari itu pemerintah harus memberikan fasilitas yang memadai bagi para pekerja untuk melakukan mobilitas menuju tempat kerjanya dengan mudah.

Referensi

- Elvina, S. N. (2019). Teknik self management dalam pengelolaan strategi waktu kehidupan pribadi yang efektif. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 3(2), 123-138
- Mutiawati, C. (2019). Kinerja Pelayanan Angkutan Umum Jalan Raya. Deepublish.
- Puspitasari, E., Meydiyana, A. A., & Maryunani, W. P. (2022). Analisis Karakteristik Perilaku Perjalanan Angkutan Umum Jenis Paratransit di Kota Magelang. *Reviews in Civil Engineering*, 6(2), 61-66.
- Destian, Farhan. *KAJIAN EFEKTIVITAS BUS TRANS METRO BANDUNG TRAYEK LEUWIPANJANG – ANTAPANI*, 2019, p. 4. *One Search by Perpunas*, <http://eprints.itenas.ac.id/454/5/05%20Bab%20%20222015090.pdf>. Accessed 10 Maret 2023
- Dihni, Vika Azkiya. "Indeks TomTom: Kemacetan Jakarta Terus Berkurang dalam 5 Tahun Terakhir." *Databoks*, databoks, 2 March 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/02/indeks-tomtomb-kemacetan-jakarta-terus-berkurang-dalam-5-tahun-terakhir>. Accessed 27 Maret 2023.
- Wijianto, Wijianto, et al. *Analisis Kepuasan Publik Terhadap Angkutan Umum Model Jak Lingko Sebagai Pengintegrasian Antar Moda Transportasi Publik Di DKI Jakarta*, vol. 9, 2022, p. 5. *Garuda Kemdikbud*, y99